

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA BATANG KULIM KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



OLEH :

NIA YUNIATI SIAGIAN

NPM : 167110364

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan petunjuk kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S. Sos., M. Si selaku Kaprodi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan bimbingan berupa arahan dan masukan serta saran demi kesempurnaan penulisan usulan penelitian ini.

4. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Siselaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan berupa masukan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Administrasi Publik yang telah mendidik dan memfasilitasi kebutuhan akademik, khususnya dalam bidang Administrasi Publik. Semoga ilmu yang diberikandapat kami manfaatkan.Amin.
6. Seluruh Staf Karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan adminisrtrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Teristimewa dengan ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, dan untuk saudara yang selalu memberikan do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, dan selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luarbiasa.
8. Teristimewa sahabat-sahabat seperjuangan dengan ucapan terimakasih penulis persembahkan selalu memberikan semangat dan bantuan-bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
9. Teman-teman angkatan dan seperjuangan Adminitrasi Publik 2016 yang telah menemani semasa kuliah dan berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu, terimakasih untuk kebersamaannya.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah bersedia memberikan tanggapannya kepada penulis yang bermanfaat didalam penyempurnaan Skripsi ini.

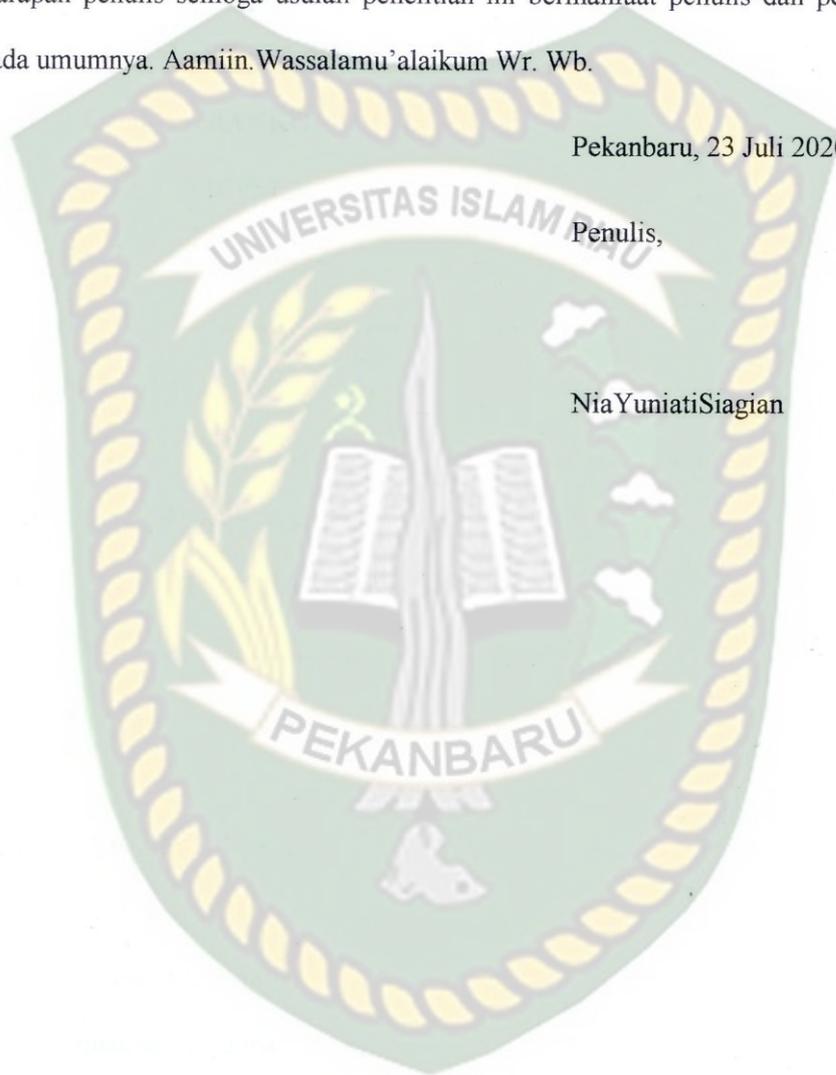
Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan usulan penelitian ini dapat menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis

menyadari bahwa usulan penelitian ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Harapan penulis semoga usulan penelitian ini bermanfaat penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 23 Juli 2020

Penulis,

Nia Yuniati Siagian

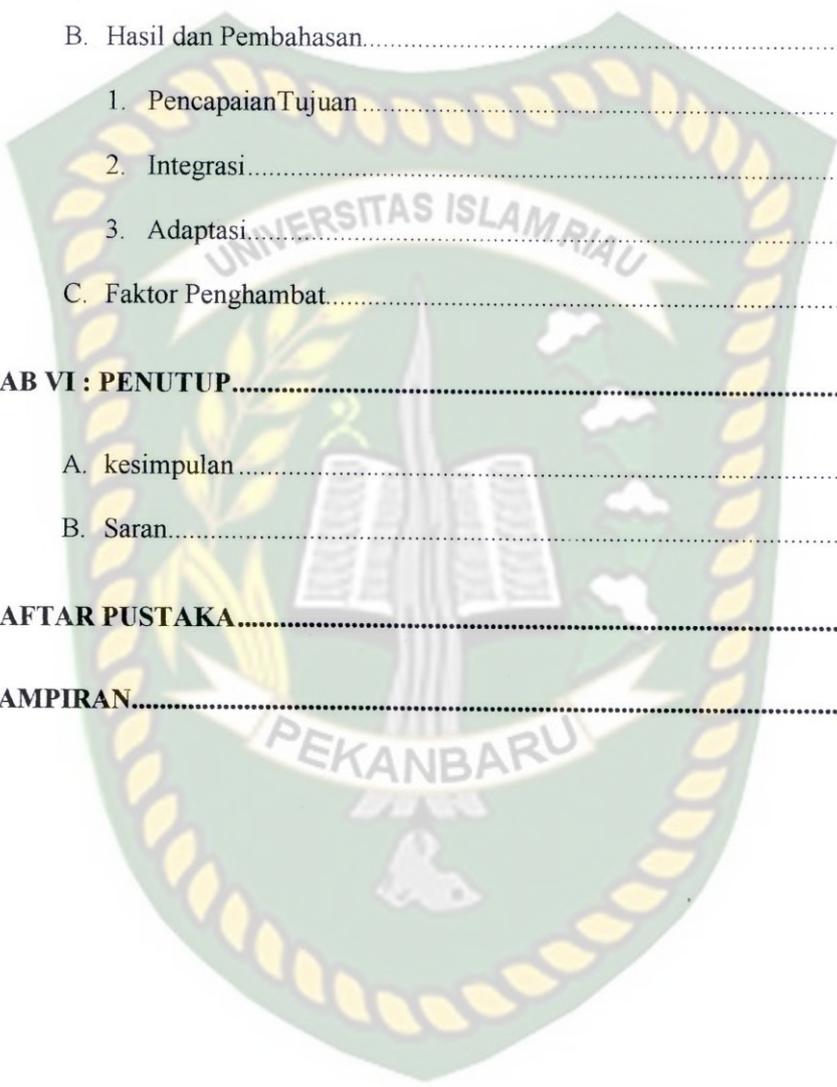


DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITAACARAUJIANKONFREHENSIF.....	iv
PENGESAHANSKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Administrasi.....	13
2. Konsep Organisasi	14
3. Konsep Manajemen	15

4. Konsep Efektivitas.....	16
5. Konsep Pajak	19
B. Kerangka Pikir	26
C. Hipotesis	27
D. Konsep Operasional.....	27
E. Operasional Variabel.....	29
F. Teknik Pengukuran.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Teknik Penarikan Sampel.....	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	39
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	41
A. Terbentuknya Kabupaten Pelalawan.....	41
B. Luas Wilayah dan Kependudukan	41
C. Kecamatan Pangkalan Kuras.....	45
D. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabupatenPelalawan.....	46

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Identitas Responden	48
B. Hasil dan Pembahasan.....	51
1. Pencapaian Tujuan	51
2. Integrasi.....	56
3. Adaptasi.....	61
C. Faktor Penghambat.....	69
BAB VI : PENUTUP.....	71
A. kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 :Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (hunian) di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan Tahun 2017, 2018, dan 2019.....	9
I.2 :Target Pajak Bumi dan Bangunan (hunian) di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan Tahun 2017, 2018, dan 2019.....	10
II.1 : Konsep Operasionalisasi Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	29
III.1 : Populasi dan Sampel penelitian Epektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	35
III.2: Jadwal Waktu KegiatanPenelitian Epektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan PangkalanKuras Kabupaten Pelalawan.....	39
IV.1 : Daftar Kecamatan di KabupatenPelalawan.....	43
V.1 : Distribusi Jenis Kelamin Responden penelitian	48
V.2 : Distribusi jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	49
V.3 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Wajib Pajak).....	50

V.4	: Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Dinas).....	51
V.5	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pencapaian Tujuan (Dinas).....	52
V.6	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pencapaian Tujuan (Wajib Pajak).....	54
V.7	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Integrasi (Dinas).....	56
V.8	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Integrasi (Wajib Pajak).....	59
V.9	: Distribusi Jawaban Respon den Penelitian Tentang Adaptasi (Dinas).....	61
V.10	: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Adaptasi (Wajib Pajak).....	64
V.11	: Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (Dinas).....	66
V.12	: Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (Wajib Pajak).....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.....	7
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	26
IV.1 : Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pelalawan.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Kuisisioner Wajib Pajak Desa Batam Kulim	80
2. Daftar Kuisisioner Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD).....	86
3. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di DesaKecamatan Batang Kulim Kabupaten Pelalawan.....	92
4. Daftar Telly Penelitian.....	95
5. Dokumentasi Penelitian.....	98

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Yuniati Siagian
NPM : 167110364
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan kaya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juli 2020



Nia Yuniati Siagian

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
DESA BATANG KULIM KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh

NIA YUNIATI SIAGIAN

Penelitian ini didasari oleh pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi penerimaan negara. Dengan melihat besar dan kecilnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di suatu daerah, kita dapat mengukur tingkat efektivitasnya. Dalam mengukur efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan peneliti menggunakan 3 (tiga) indikator efektivitas yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Sebagai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Pelalawan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka peneliti menggunakan tipe penelitian Kuantitatif Deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Kuisisioner, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara keseluruhan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim cukup efektif, walaupun hasil kuisisioner terhadap populasi pegawai (Dinas) menunjukkan hasil cukup efektif dengan persentase (45%) dan jumlah masyarakat sebagai populasi lebih banyak dari pada jumlah pegawai dengan kategori cukup efektif (53%).

Dalam proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terdapat banyak hambatan yang belum diselesaikan. Jadi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan perlu meningkatkan efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan supaya Target Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi.

Kata kunci: Efektifitas, PBB, Kuantitatif

**EFFECTIVENESS OF LAND AND BUILDING TAX COLLECTION IN
BATANG KULIM VILLAGE PANGKALAN KURAS SUBDISTRICT
PELALAWAN REGENCY**

By

NIA YUNIATI SIAGIAN

This research is based on importance of land and building tax for state revenue. By looking at the size of the realization of land and building tax in area, we can measure the level of effectiveness. In measuring the effectiveness of land and building tax collection researchers use 3 (three) indicators of effectiveness that are the main reference in conducting research to achieve the desired research objectives. As the purpose of this study is to determine the Effectiveness of land and building tax collection conducted by the Financial Management Agency and Regional Assesst of Pelalawan Regency (BPKAD). To achieve the objectives of this study, the researchers used a Descriptive Quantitative research type that describing the results of research using data collection techniques namely Questionnaires, Observations, Interviews, and Documentations. The results of research conducted indicate that the overall effectiveness of land and building tax collection in the Batang Kulim Village is not effective, although the results of the questionnaire on the employees popolation Dinas(45%)show quite effective results but the total of public as population is greater than the total of employees as population (53%). In the Land and Building Tax Collection process there are many obstacles that have not been resolved. Thus, The Financial Management Agency and Regional Assets of Pelalawan Regency (BPKAD) need to increase The Effectiveness of Land Building Tax Collection so that The Land and Building Tax targets are realized.

Keywords: Effectiveness, Tax, Quantitative

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah diberikan kepada provinsi/kabupaten/kota agar mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan UU pasal 18 ayat 2 tahun 2002 pemerintah daerah dan provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu penunjang pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah tersedianya dana keuangan daerah yang memadai. Sumber-sumber pendapatan daerah tidak hanya di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah saja, diantara sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik suatu daerah.

Untuk melakukan pembangunan, pendanaan adalah hal yang harus dipersiapkan pengadaannya agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Negara Indonesia pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah output dari pembayaran pajak yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak pun merupakan hal yang

penting pula, agar pembayaran pajak yang merupakan sumber pendapatan terbesar Negara dan digunakan untuk pembangunan yang sebesar-besarnya dapat berjalan sesuai dengan yang sudah rencanakan.

Untuk merealisasikan salah satu tujuan pembangunan nasional melalui pajak dan meningkatkan upaya penerimaan Negara dari sektor pajak berkaitan dengan pentingnya peran pajak dalam sistem ekonomi, peran dari beberapa pihak dalam menunjang keberhasilan proses pembangunan, yaitu masyarakat baik golongan atas, menengah ataupun bawah serta pemerintah sebagai fasilitator yang mengelola. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga pemerintah dapat memberikan efek positif kepada upaya pendapatan dan penerimaan pajak untuk pembangunan daerah. Karena dengan demikian, tujuan pembayaran pajak yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata akan terwujud dalam bentuk pembangunan di berbagai sektor.

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 77 Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan dan perkotaan ditetapkan oleh peraturan daerah. Sedangkan untuk dasar regulasi pada Kabupaten Pelalawan sendiri itu berpedoman pada Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pelalawan.

Dalam hal ini masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor ini mencukupi atau sesuai standar yang ditentukan sebelumnya. Agar memperoleh jumlah pendapatan yang maksimal dari sektor pajak memerlukan perencanaan yang akurat. Salah satu fungsi pembayaran pajak adalah mengoptimalkan pembangunan suatu daerah dan membiayai pengeluaran yang diperlukan oleh daerah. Sebagai salah satu indikator peningkatan proses pembangunan, pajak memiliki peran yang penting dan menuntut masyarakat untuk mampu tertib dalam pembayaran wajib pajak.

Tujuan pembangunan daerah untuk memberdayakan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan wewenang otonomi mulai dari sektor perkotaan dan pedesaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penagihan pajak kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi yang melekat, yang kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing kabupaten/kota dalam proses mekanisme pemungutan pajak yang akan dilakukannya. Sehingga, dalam hal ini tupoksi pemerintah untuk memajukan partisipasi masyarakat pun sangat berpengaruh. Pola pemungutan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal

23 UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan Pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pajak tersebut peneliti melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Pelalawan masih belum efisien sehingga kesadaran dari masyarakat pun masih belum maksimal. pemerintah Kabupaten Pelalawan mempunyai hak dan wewenangnya sendiri dalam mengatur dan mengurus daerah otonom yang telah diberikan kepadanya. Hal ini juga tak luput dari pendanaan untuk kepentingan bersama. Dalam menjalankan wewenang tupoksi yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat mengatur rumah tangganya sendiri dan mengoptimalkan Sumber daya yang ada, salah satunya pajak bumi dan bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sementara salah satu peran dari pembayaran pajak adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan membiayai pengeluaran daerah. Menuntut masyarakat untuk tertib wajib pajak mempunyai arti penting tersendiri bagi pembangunan daerah yang mana pembangunan daerah adalah upaya

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan dapat dilihat secara fisik maupun non fisik seperti aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha ketika daerah tersebut pada kondisi yang berdaya saing tinggi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat dengan BPKAD Kabupaten Pelalawan merupakan salah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dimana bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Dimana dalam Peraturan tersebut dijelaskan tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi. BPKAD Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

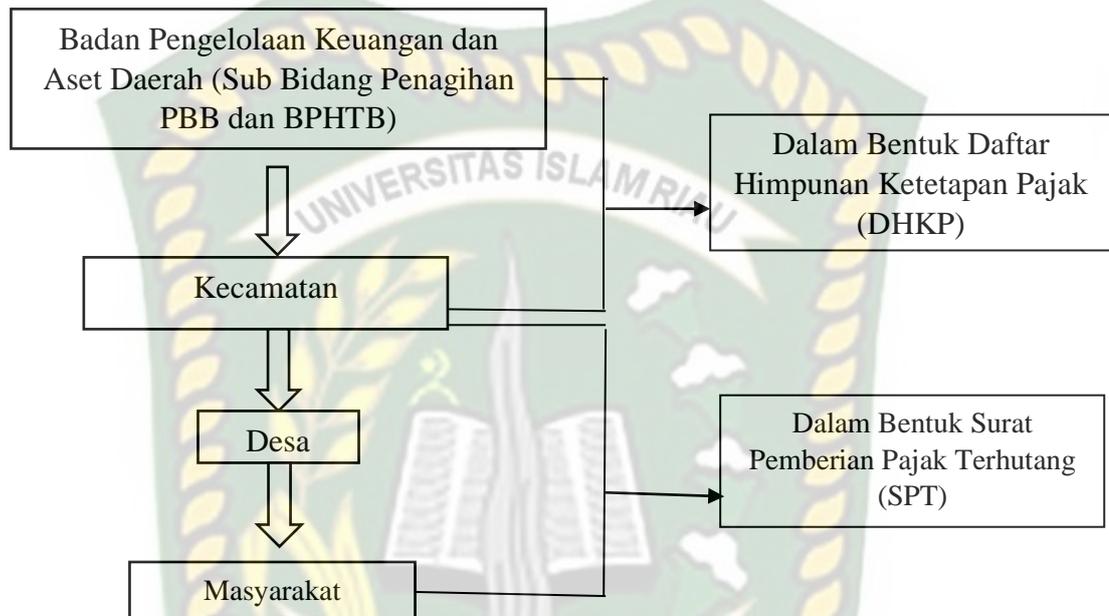
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
4. pelaksanaan kesekretariatan Badan, dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya, adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 terdiri dari sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah
4. Bidang perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi dan Keuangan
6. Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah
7. Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding
8. Bidang Aset
9. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Dalam urusan Pajak Bumi dan Bangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding spesifiknya yaitu pada Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berikut ini penulis akan melampirkan Gambar Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.

Gambar I.1: Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan sistem official assessment karena pendataan, teguran atau sanksi, dan juga pemungutan adalah peran dari pemerintah walaupun dari segi pembayaran masyarakat masih bisa membayar sendiri dengan datang ke BPKAD.

Pemungutan dilakukan oleh petugas BPKAD didampingi perangkat desa terkait. Berdasarkan peraturan pemungutan dilakukan tiga kali dalam setahun, biasanya bulan maret, juni, dan september. Tetapi berdasarkan wawancara dengan pihak BPKAD yang peneliti lakukan terkadang karena keterbatasan waktu, dan tenaga dinas memanfaatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan dari

dinas, dengan cara menyerahkan SPT kepada desa, kemudian desa yang memungut. Menindak lanjuti pernyataan dinas tersebut, peneliti melakukan observasi ke kantor desa dan menemukan banyak SPT yang menumpuk dan tidak disebarakan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga memiliki program kegiatan sosialisasi sadar pajak kepada masyarakat, biasanya seperti mendirikan posko penyuluhan yang posko nya itu sendiri dilakukan disalah satu rumah warga.

Jadwal pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Batang Kulim dilakukan setahun sekali dengan cara mendirikan posko biasanya yang dijadikan posko adalah salah satu rumah warga, atau sosialisasi dilakukan bisa saja pada saat petugas turu ke rumah warga sekaligus untuk melakukan penagihan. Desa Batang Kulim terletak di kecamatan Pangkalan Kuras terbagi 3 Kilometer yaitu Kilometer 6 sebagai lokasi pusat pemerintahan Desa Batang kulim, Kilometer 7, dan Kilometer 8. Terdiri dari 3 dusun Dusun 1 Candi Mulyo, Dusun 2 Air Putih dan Dusun 3 Pasawoh.

Berikut adalah tabel jumlah bangunan terdaftar (Wajib Pajak) terangkum dalam data 3 tahun terakhir

Tabel 1.1: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (hunian) di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan Tahun 2017, 2018, dan 2019.

No	Tahun	Jumlah WP tidak bayar	Jumlah WP sudah bayar	Total WP
1	2017	1079	642	1721
2	2018	887	291	1178
3	2019	718	323	1041

Sumber : Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Dari tabel diatas terlihat bahwa data jumlah wajib pajak desa Batang Kulim menurun sangat jauh setiap tahunnya. sedangkan dari pengamatan yang sudah di lakukan masyarakat yang membangun rumah di desa Batang Kulim semakin bertambah hampir setiap tahunnya, artinya banyak masyarakat tidak melaporkan bangunannya dan dinas tidak upgrade terhadap data. Tentu ini menjadi fenomena yang serius karena bisa mempengaruhi pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1.II : Target Pajak Bumi dan Bangunan (hunian) di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan Tahun 2017, 2018, dan 2019.

No	Tahun	Jumlah Target	Terealisasi	Terhutang
1	2017	95.318.805	10.083.260	85.235.545
2	2018	18.430.289	8.083.709	10.346.580
3	2019	31.182.050	18.692.928	12.489122

Sumber : Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Dapat dilihat dari data perolehan target pajak bumi dan bangunan 3 tahun terakhir di Desa Batang Kulim mengalami naik turun yang signifikan. Banyak nya nilai terhutang dikarenakan pemungutan yang tidak efektif sebab kesalahan data yang di miliki oleh BPKAD sebagai acuan pemungutan, kesalahan data yang dimiliki juga menyebabkan banyak nya SPT yang tidak keluar dan ada juga SPT yang keluar tetapi salah data terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

- a. Masih ditemukan masyarakat yang tidak mendapatkan SPT, dikarenakan pendataan yang belum benar, petugas BPKAD yang tidak upgrade terhadap data masyarakat.

- b. Tidak ada tindakan yang berarti dari lembaga yang bersangkutan dalam upaya meniadakan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan sehingga masalah ini belum selesai dari jangka waktu sebelumnya hingga sekarang.
- c. Sosialisasi sadar pajak yang tidak merata. BPKAD memiliki program memberikan sosialisasi sadar pajak kepada masyarakat namun jadwal sosialisasi yang tidak terstruktur seperti tidak ada waktu yang pasti kapan sosialisasi di adakan, dan bagaimana kegiatan nya terlaksana. Pihak BPKAD menjelaskan kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan dengan mendirikan posko di salah satu rumah warga, ada juga bentuk sosialisasi dengan cara pada saat petugas menyampaikan SPT pada saat itu sosialisasi sadar pajak di sampaikan. Namun di Desa Batang Kulim tidak ditemui ada nya sosialisasi sadar pajak di lakukan dalam bentuk apapun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti dapat mengangkat permasalahan penelitian tentang "Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawandalam hal ini peneliti membatasi studi kasus hanya pada pajak bumi dan bangunan "Hunian" dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ?

1. Tujuan dan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah yang telah di rumuskan, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di di desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangpemikiran tentang teori efektifitas berhubungan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
2. Manfaaat Praktis: Bisa memberikan saran dan bantuan informasi khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan
3. Manfaaat Akademis : Bisa menjadi bahan masukan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama ataupun melanjutkan penelitian

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep administrasi

Administrasi adalah serangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien (Syafri,2012;11).Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian,2003;2).

Sedangkan Hodgkinson dalam Kusdi menyatakan atau mendefinisikan administrasi sebagai aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen manusia dalam organisasi (Kusdi,2011;7)

Administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau sekretariat berupa surat menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Zulkifli, 1995;16)

Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat mengatakan administrasi secara sempit yaitu meliputi catat-mencatt, surat-menyurat, pemukuan ringan, ketik-mengketk, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (1988;2)

Menurut Soepardi administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (1988;7)

Administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu (Teard,2003;3)

Dan administrasi negara bisa didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara (Siagian,2003;7)

2. Konsep Organisasi

Menurut James D. Mooney (dalam Inu,2003;113) organisasi adalah segala bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sondang P Siagian (dalam Zulkifli 2015:6) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan sesorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas, kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas (Zulkifli 2009;71).

Menurut Dwight Waldo (dalam Inu,2003;114) maksudnya organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Sedangkan menurut Sufian (2005;13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah tempat diberlakukannya administrasi didalamnya terdapat jaringan kerja antar perorangan maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri ataupun diluarnya. Terjadi serangkaian aktivitas kerja ataupun peran masing-masing bagi siapapun yang terlibat dengan organisasi tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

3. Konsep Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata management (bahasa Inggris) turunan dari kata "To Manage" yang artinya suatu cara seseorang untuk mengatur, membimbing, dan memimpin orang lain yang menjadi pembantunya dalam pencapaian usaha guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut George Terry (dalam Inu,2003;117) manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut John D. Millet (dalam Inu,2003;118) manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Manajemen didefinisikan menurut Marry Parker Follet (dalam Sabardi,2001;3) mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Menurut Sondang P. Siagian, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

Menurut Oliver Sheldon (dalam Inu,2003;17) manajemen adalah sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.

Jadi dapat dikatakan manajemen adalah aspek dari administrasi maka administrasi lebih luas dari pada manajemen.

4. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dalam organisasi dapat dikatakan berhasil apabila organisasi dapat mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga itu nantinya dapat menjadi tolak ukur

pelaksanaan kerja. Tentukan didalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun, program.

menurut Dun Can efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Indikator efektivitas menurut Dun Can sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dalam hal ini keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
2. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Steers dalam halim (2004:166) efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Peter F. Drucker efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran yang akan dicapai.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2001:24) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2004:134) efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dari beberapa pengertian efektivitas di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dari hasil sebuah perencanaan, semakin baik hasil yang didapat maka semakin tinggi nilai efektivitasnya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka efektivitas yang dimaksud adalah hubungan antara kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan realita yang ada. Efektif atau tidaknya dapat dilihat nanti dari kinerja organisasi yang sudah sesuai dengan perencanaan awal atau tidak.

Jenis-jenis efektivitas:

Efektivitas memiliki 3 tingkatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh David J. Lawes dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26):

1. Efektivitas individu yaitu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi
2. Efektivitas kelompok adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya
3. Efektivitas organisasi yaitu terdiri dari efektifitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

5. Konsep Pajak

Kedudukan pajak merupakan iuran yang diberikan masyarakat kepada negara dan merupakan hal yang dipaksa menurut peraturan-peraturan seta akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang nantinya berfungsi untuk penyelenggaraan negara.

Diungkapkan oleh Prof. Edwin R. A. Seligman dalam Waluyo (2005: 2). Bahwa pajak merupakan sebuah kontribusi wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada negaranya tanpa adanya manfaat khusus yang ditujukan secara khusus untuk seseorang atau individu, karena manfaat pajak itu sendiri hanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut PJA. Andrian dalam Suparno (2012: 31) Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Hukum pajak diberikan ruang tersendiri walaupun ada kaitannya dengan hukum administrasi. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan cermat mengenai penempatan kesejajaran antara kedua hukum ini, antara lain:

- a. Tugas hukum pajak bersifat berbeda dengan hukum administrasi
- b. Hukum pajak nantinya dapat secara langsung digunakan sebagai ketetapan sarana politik perekonomian oleh masyarakat
- c. Dalam bidang pekerjaannya, hukum pajak memiliki tata tertib serta istilah-istilah yang khas didalamnya.

Dalam pengertian lain Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah merupakan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis Pajak Daerah

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- k. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dari penjelasan beberapa pendapat ahli mengenai pajak maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara untuk digunakan dalam hal kepentingan pembiayaan negara. Masyarakat yang membayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah tetapi hasilnya dapat dirasakan masyarakat/wajib pajak dalam hal pembangunan ataupun pelayanan yang diberikan negara pada masa yang akan datang.

Terdapat ciri-ciri yang telah melekat pada pengertian pajak yang telah disampaikan oleh beberapa para ahli di atas yaitu, Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang sehingga dalam pelaksanaannya dapat bersifat dipaksakan, serta dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, tidak ada

kontraprestasi individual oleh individual, Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pajak dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat, yang apabila dalam pemasukannya masih terdapat surplus maka akan digunakan untuk membiayai kepentingan public investment, Selain bertujuan untuk budgeter, pajak juga memiliki tujuan untuk mengatur.

c. asas pemungutan pajak

adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1. Asas tempat tinggal, negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau luar negeri
2. Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan oleh suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
3. Asas sumber negara, mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Diungkapkan oleh Mardiasmo (2006:3) bahwa terdapat beberapa teori yang memberikan beberapa justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya Pikul (unsur ojektif dan unsur subjektif)
4. Teori Bakti
5. Teori Asas Daya Beli

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga cara menurut Waluyo (2005:17)

1. Official assesment system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Penggunaan sistem ini biasanya digunakan oleh pajak bumi dan bangunan, karena melibatkan masyarakat dari semua lapisan yaitu mereka memiliki, menguasai atau mengambil manfaat dari bumi dan bangunan selaku subjek pajak

2. Self assesment system

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, penggunaan self assesment system merupakan cara yang menuntut warganya untuk bisa melakukan pemenuhan kewajibannya sendiri. Penggunaan sistem ini memerlukan kesadaran yang penuh dari masyarakat yang merupakan wajib pajak.

3. With holding system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif pula, namun yang melakukan tanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak adalah pihak ketiga.

Dari ketiga sistem pemugutan pajak diatas maka pemungutan pajak bumi dan bangunan menggunakan sistem official Assesment System. Dan juga pemungutan pajak dilarang diborongkan, sehingga setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayarkan sendiri oleh wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayarka sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak

Terdapat beberapa hambatan dalam pemugutan pajak yang berpengaruh kepada nilai pajak yang diperoleh. Menurut Mardiasmo (2006:8) hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

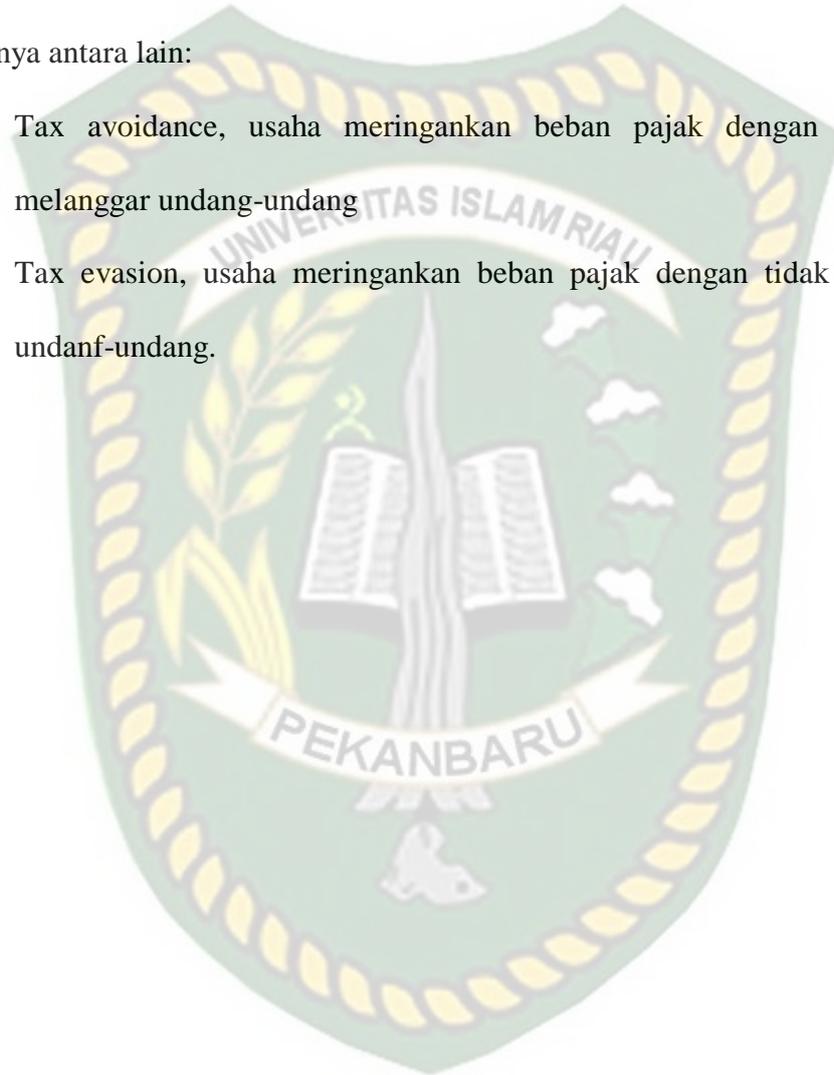
- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kotrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

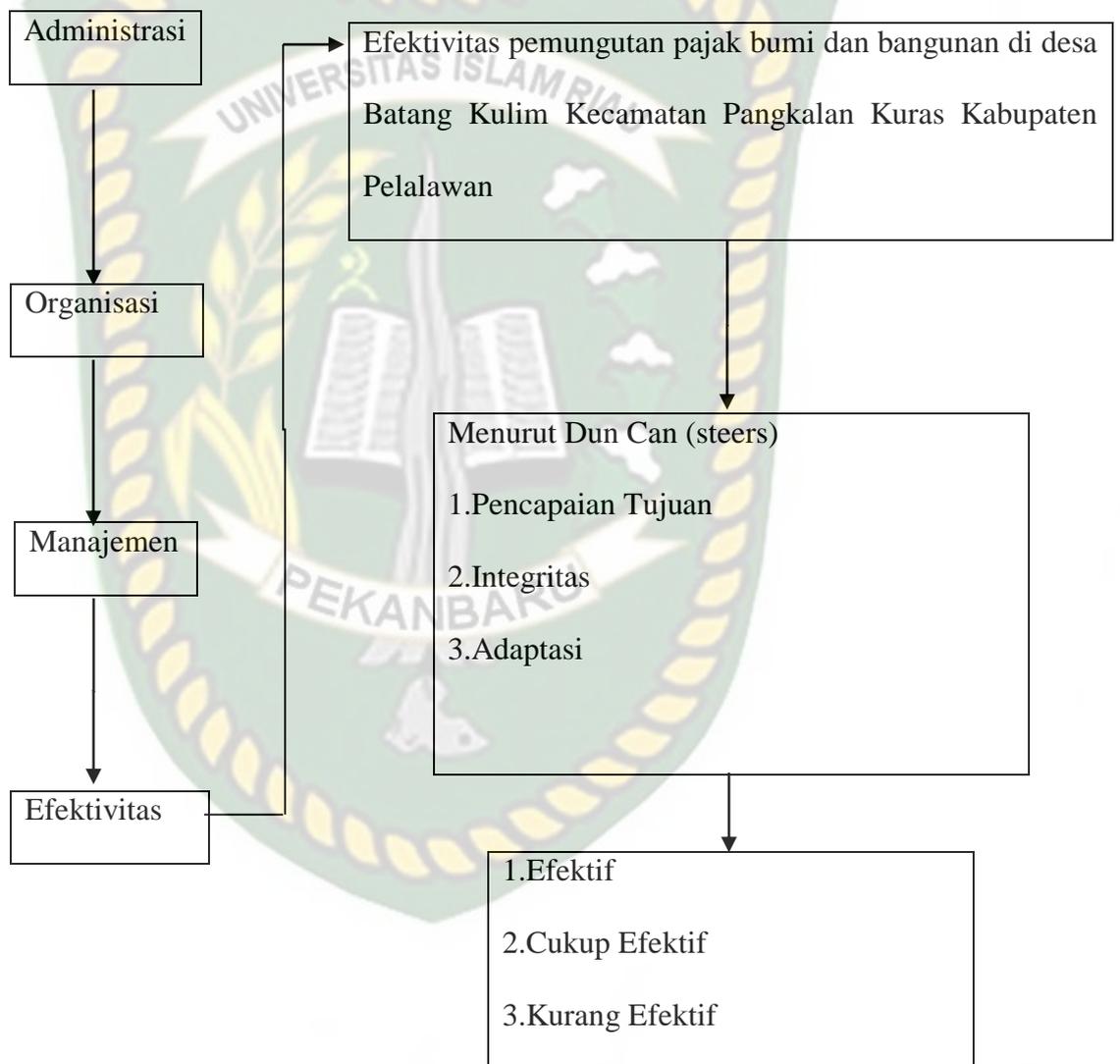
Entuknya antara lain:

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undangf-undang.



B. Kerangka Pikir

GambarII.I: Kerangka Pikir Penelitian Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan



C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah Diduga pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didesa Batang Kulim kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum efektif karena ada dugaan sementara di lihat dari indikator-indikator efektivitas yang peneliti gunakan.

D. Konsep Operasional

1. Administrasi adalah serangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien
2. Organisasi adalah segala bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama
3. Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
4. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan daerah dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

6. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.
7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.
8. Pencapaian Tujuan dalam hal ini keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
9. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi
10. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

E. Konsep Operasional Variabel

Tabel II.1: KonsepOperasionalisasiEfektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan,ataupun program.(dalam Duncan)	Efektivitas	1.Pencapaian Tujuan	1.Tercapainya target pajak sesuai ketentuan daerah	Efektivitas
		2.Integrasi	2.Ketaatan masyarakat membayar pajak 3.Ketepatan waktu masyarakat membayar pajak 1.Sosialisasi	Cukup Efektivitas Kurang Efektivitas Efektivitas

			tentang Pajak	Cukup
			2.Pendataan	Efektivitas
			pembayaran	
			kepada wajib	Kurang
			pajak	Efektivitas
			3.Pemberitahuan	
		3.Adaptasi	kepada kepada	Efektivitas
			wajib pajak	
			1.Komunikasi	
			Dengan	
			Perangkat Lain	
			Terkait	Cukup
			2.Ketersediaan	Efektivitas
			Pembayaran	Kurang
			Alternatif	Efektivitas
			3.Pemberian	
			Sanksi dari	
			Petugas	

F. Teknik Pengukuran

Penelitian setiap indikator ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018;93). Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini menggunakan kategori penilaian yakni:

1. Ukuran variabel

Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Kurang Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

2. Ukuran Indikator Variabel

a. Pencapaian Tujuan

Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada kategori 67-100%

Cukup Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Tidak Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

b. Integrasi

Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada kategori 67-100%

Cukup Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Tidak Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

c. Adaptasi

Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada kategori 67-100%

Cukup Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Tidak Efektif : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, penulis menggunakan tipe penelitian survey deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung di lapangan pada saat tertentu dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil yang relevan dengan variabel yang diteliti (Sugiyono 2003).

Kemudian Tipe penelitian yang di gunakan dengan menggunakan metode kuantitatif menurut (Sugiyono 2003) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang berdasarkan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi mengenai efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Daerah, maka penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) di Kabupaten Pelalawan sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim yang masih belum efektif karena banyak hal yang harus di benahi

seperti masyarakat yang tidak taat pajak, pendataan masyarakat yang salah sehingga tidak mendapatkan SPT, dan sebagainya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:90)

Dari penelitian ini yang berjudul efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, staff pegawai, dan masyarakat. Sampel adalah suatu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi, 2012; 254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2018; 81)

**Tabel III.I :Populasi dan Sampel penelitian Epektifitas Pemungutan Pajak
 Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan
 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kabid Penagihan,keberatan dan banding	1	1	100 %
2	Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB	1	1	100%
3	Staff sub Penagihan PBB dan BPHTB	7	7	100%
4	Wajib Pajak	1041	30	3%
	Jumlah	1050	39	100%

Sumber:Data Penelitian 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan untuk Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, serta Staff Pegawai adalah menggunakan Teknik Sampling Jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel.

Kemudian untuk menentukan sampel masyarakat peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan, dan penilaian

tertentu yang dianggap sudah mewakili keseluruhan jumlah populasi. Jumlah populasi masyarakat Wajib Pajak adalah 1041 maka peneliti membatasi sampel 30 orang. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu (Sugiyono, 2018:81) maka peneliti mengambil sampel dari populasi itu yang dianggap sudah mewakili sesuai pertimbangan tertentu yaitu adalah masyarakat terdaftar wajib pajak, tingkat pendidikan yang bervariasi yang paling diperhatikan oleh peneliti, kemudian tingkat umur, serta alasan peneliti membatasi sampel menjadi 30 orang dipengaruhi oleh kondisi dan suasana covid-19 yang berdampak kepada keterbatasan peneliti dalam menentukan sampel.

E. Jenis Data Dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari responden yang dijadikan sampel melalui angket serta pihak-pihak yang terkait (kuesioner), wawancara (interview), dan pengamatan (observasi).
Data yang di peroleh seperti:
 - a. Identitas Responden
 - b. tanggapan responden mengenai Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen administrasi atau bahan lain yang sudah merupakan data pendukung dalam peneliti. Adapun data yang diperlukan seperti:

- a. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan penelitian ini maka Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kuisisioner (daftar pertanyaan) yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis sesuai permasalahan, kemudian disebarkan kepada responden terpilih untuk disesuaikan dengan alternatif dan jawaban yang telah disediakan
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.
3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Kegiatan wawancara bisa dilakukan berdialog

langsung secara lisan antara peneliti dan responden atau bisa juga melalui telepon.

4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen , baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (analisa data dengan satu variabel), yaitu yang terkumpul dari hasil penelitian wawancara terlebih dahulu dioalah dan ditambah dari hasil penelitian dengan menggunakan kuisisioner dan observasi kemudian ditarik kesimpulan serta penjelasan terhadap hasil penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk kuantitatif yang merupakan data formal diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Sep				Nov				Feb				Mart				Aprl				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Daftarwawan cara																												
5	Rekomendasi survey																												
6	Survey lapangan																												
7	Analisis data																												
8	Penyusunanskripsi																												

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Terbentuknya Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah Kabupaten yang berdiri sejak tahun 1999 merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kampar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 Sementara peresmian oprasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 05 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten pelalawan juga merupakan wilayah pedesaan (rural area), hal ini antara lain dicirikan dari kepadatan penduduk relatif rendah dibandingkan wilayah perkotaan, kondisi penggunaan tanah umumnya bersifat pertanian, mata pencarian penduduk umumnya di sektor pertanian, serta komposisi pendapatan regional terbesar juga dari sektor pertanian.

B. Luas Wilayah dan Kependudukan

Luas Kabupaten Pelalawan 1.392.494 Ha, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan dan sebagian lainnya kepulauan Beberapa pula besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendol (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuah dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan mencapai 365.817 Jiwa dengan kepadatan penduduk 0,30 jiwa/ha, di Kabupaten Pelalawan terdapat 12

Kecamatan, 104 Desa dan 14 Kelurahan Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran sungai, perkebunan dan transmigrasi.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera di belahan tengah Provinsi Riau. Secara geografis kabupaten Pelalawan terletak pada koordinat $1^{\circ} 25'$ Lintang Utara sampai dengan $0^{\circ} 20'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 42'$ Bujur Timur sampai dengan $103^{\circ} 28'$ Bujur Timur dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut.

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005, Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan :

1. Bandar Petalangan, Luas 36.996,29 Ha
2. Bandar Sei Kijang, Luas 31.856,87 Ha
3. Bunut, Luas 40.620,09 Ha
4. Kerumutan, Luas 95.314,31 Ha
5. Kuala Kampar, Luas 80.905,31 Ha

6. Langgam, Luas 142.396,15 Ha
7. Pangkalan Kerinci, Luas 18.716,16 Ha
8. Pangkalan Kuras, Luas 117.746,75 Ha
9. Pangkalan Lesung, Luas 50.159,83 Ha
10. Pelalawan, Luas 147.060,05 Ha
11. Teluk Meranti, Luas 391.140,47 Ha
12. Ukui, Luas 129.268,77 Ha

Tabel IV.1 : Daftar Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan/Desa	Luas		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Ha	%Wilayah	Jiwa	%Penduduk	
1	Bandar Petalangan	36.996,29	2.89	14.517	4.53	0.36
2	Bandar Sei Kijang	31,856.87	2.48	41.184	4.93	0.45
3	Bunut	40,,620.09	3.17	16.496	3.79	0.27
4	Kerumutan	95,314,31	7.43	25.423	5.76	0.18
5	Kuala Kampar	80,905.73	6.31	18.198	7.96	0.27
6	Langgam	142,396,15	11.11	33.440	7.59	0.11
7	Pangkalan Kerinci	18,716.16	1.46	134.672	5.55	3.81
8	Pangkalan Kuras	117,746.751	9.18	66.221	24.36	0.35
9	Pangkalan Lesung	50,150.83	3.91	33.509	14.23	0.46

10	Pelalawan	147,060.05	11.47	14,513	7.89	0.10
11	Teluk Meranti	391,140,47	30.51	19,410	4.96	0.05
12	Ukui	12,286.77	10.08	41.204	6.64	0.22
	Total	1,268.77	100.00	460.780	100.00	0.23

Sumber : Hasil Perhitungan Peta Digital, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (2018) dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan (2019)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 adalah sebanyak 460.780 Jiwa . paling banyak terdapat di Kecamatan Pangkalan Kerinci 134.672 jiwa di susul Kecamatan Pangkalan Kuras 66.221 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Bandar Petalangan 14.517 jiwa.

Setelah dikombinasikan dengan data luas wilayah menurut hasil perhitungan peta digital (1.282.181,47), di peroleh angka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 0,23 jiwa /ha bila ditinjau dari segi kepadatan penduduk perkecamatan, Kecamatan Pangkalan Kerinci menduduki tempat teratas dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 0,23 jiwa/H. Bila ditinjau dari kepadatan penduduk perkecamatan, Kecamatan Pangkalan Kerinci menduduki tempat teratas dengan kepadatan 3,81 jiwa/Ha kondisi ini di mungkinkan mengingat tipikal daerah tersebut merupakan pusat aktivitas perekonomian dan pemerintah yang terkonsentrasi di Kota tersebut, sedangkan kepadatan paling rendah berada di Kecamatan Teluk Meranti 0.05 jiwa/Ha.

Ditinjau dari aspek fisiografis, Kabupaten Pelalawan sebagian besar merupakan Dataran rendah. Dilihat dari ketinggian beberapa daerah atau kota di Kabupaten Pelalawan dari permukaan laut berkisar antara 2-40 m Daerah atau kota yang tertinggi adalah Langgam, Pangkalan Kerinci, Sorek Satu (Pangkalan Kuras) dan Pangkalan Lesung dengan tinggi masing-masing diatas 30m dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kuala Kampar) 2m dari permukaan laut.

C. Kecamatan Pangkalan kuras

Wilayah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yakni Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar Namun setelah terbit Surat Dirjen PUOD No. 138/1775/PUOD Tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan), yakni terdiri dari 4 Kecamatan induk dan 5 Kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 Tahun 2005, maka sekarang ini Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan.

Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki sebaran penggunaan lahan cukup merata, hal ini dapat dilihat dari hasil interpretasi citra Penggunaan lahan yang terluas di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu Hutan seluas 35.737,06 Ha atau 30,16 % dan Perkebunan Sawit seluas 25.366,77 Ha atau 21,51 % dari luas

kecamatan penggunaan lahan yang paling terkecil yaitu Ladang/Tegelan 45,79 Ha atau 0,04 % dan Semak/alang-alang 222,10 Ha atau 0,19 % .

D. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (Technostructure) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta diperjelas melalui pasal 46 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu kepala daerah yang mengatur urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

BPKAD Pelalawan dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Pelalawan.

2. Visi Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Pelalawan (BPKAD)

a. Visi

Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman, dan Sejahtera)

b. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa, dan Berbudaya Melayu
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan
3. Meningkatkan penguatan sistem inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
5. Meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa
6. Meningkatkan investasi dan pengelolaan sumber daya unggulan daerah berbasis kerakyatan dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan
7. Meningkatkan ketertiban dan keamana, maka tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD kabupaten Pelalawan yang terkait dengan pencapaian misi

Dalam perjalanannya susunan organisasi dan tata kerja BPKAD Kabupaten Pelalawan mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

- a. Peraturan daerah nomor 25 tahun 2002
- b. Peraturan daerah nomor 07 tahun 2008
- c. Peraturan daerah kabupaten Pelalawan nomor 09 tahun 2012
- d. Peraturan daerah nomor 10 tahun 2016

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 10 tahun 2016, BPKAD Pelalawan melaksanakan merupakan Badan Daerah dengan type A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Selanjutnya berdasarkan peraturan Bupati Pelalawan nomor 78 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pelalawan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas responden penelitian

Untuk mengetahui jumlah responden maka membutuhkan data identitas responden berupa jenis kelamin, usia, pendidikan, itu semua berfungsi untuk mengetahui gambaran kondisi responden yang terlibat di dalam penelitian ini guna untuk memeperjelas mengenai hasil penelitian. Berikut identitas responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 : Distribusi Jenis Kelamin Responden penelitian

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Laki-Laki	35	90%
2	Perempuan	4	10%
	Jumlah	39	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden dari pegawai BPKAD, kantor desa, dan masyarakat Desa Batang Kulim lebih dominan laki-laki pada ke ikut sertaan mengisi angket dengan jumlah 35 responden atau 90% sedangkan perempuan berjumlah 4 orang atau 10%. Kemudian akan dijelaskan pembagian responden berdasarkan kelompok umur. Penjelasan mengenai kelompok umur untuk melihat gambaran dari umur responden pada penelitian ini.

Berikut tabel mengenai informasi pengelompokan umur.

Tabel V.2. Distribusi jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Responden	Persentase
1	20-30	5	13%
2	31-41	7	18%
3	41-50	18	46%
4	> 50	9	23%
	Jumlah	39	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 202

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden memiliki variasi umur yang memang seperti itu yang di inginkan peneliti. penelitian pada tingkat umur terbanyak ialah 41-50 tahun yaitu berjumlah 18 orang atau 46%. 20-30 berjumlah 5 orang atau 13%, 31-41 berjumlah 7 orang atau 18%, dan >50 berjumlah 9 orang atau 23%.

Berikutnya akan dijelaskan identitas tingkat pendidikan responden agar dapat melihat gambaran bagaimana keadaan responden dari tingkat pendidikan terakhirnya, maka distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.3. Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Masyarakat)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	14	44%
2	SMP	6	21%
3	SMA	7	24%
4	S1	3	11%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat baha identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkatan SD yaitu berjumlah 14 responden atau 44%,SMP yaitu berjumlah 6 responden 21%, SMA yaitu berjumlah 7 responden 24%, dan S1 yaitu berjumlah 3 Responden 11%.

Setelah dijelaskan identitas responden berdasarkan tingkatan jenis kelamin, umur, dan pendidikan maka berikutnya akan dijelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Tabel V.4. Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Dinas)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	D3	2	5%
2	S1	7	95%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

B. Hasil dan Pembahasan

Pada sub bab ini akan dijelaskan dan di paparkan hasil penelitian dan juga pembahasan mengenai tanggapan responden penelitian yang terdiri dari Pegawai BPKAD bidang terkait, pegawai kantor desa terkait, dan masyarakat (wajib pajak) di desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dalam hal ini adalah yang selalu ada dalam organisasi dimana keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, seperti kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit yang harus di capai karena rancangan perencanaan yang akan dibentuk dan dikerjakan harus memiliki tujuan dan ukuran yang jelas agar data dapat di ukur akumulasi

nya dengan benar dan di tetapkan tingkat keberhasilannya sejauh mana. Setelah kuisisioner di sebarakan kepada responden penelitian, kemudian data diolah maka untuk indikator Pencapaian Tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5. Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pencapaian Tujuan (Dinas)

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Tercapainya target pajak	9 100%	0 0%	0 0%	9
2	Ketaatan masyarakat membayar pajak	0 0%	7 78%	2 22%	9
3	Ketepatan waktu masyarakat membayar pajak	3 33%	6 67%	0 0%	9
Jumlah		12	13	2	27
Rata-rata		4	4	1	9
Presentase (%)		44%	44%	12%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat di lihat untuk indikator Pencapaian Tujuan pada item Tercapainya target pajak yang menjawab efektif sebanyak 9 responden atau 100% yang menjawab cukup efektif 0 atau 0% dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 0 responden atau 0%, tetapi menurut pengamatan peneliti untuk item penilaian Tercapainya Target Pajak adalah belum efektif karena hal tersebut bisa di buktikan dari data target pajak yang sudah diolah peneliti masih menunjukkan

banyaknya selisih antara yang terealisasi dengan yang terhutang. Dari item penilaian ketaatan masyarakat membayar pajak yang menjawab efektif 0 responden atau 0% yang menjawab cukup efektif ada 7 orang atau 78% dan yang menjawab tidak efektif ada 2 responden atau 22%, tetapi menurut pengamatan peneliti untuk item penilaian Ketaatan Masyarakat Membayar Pajak juga belum efektif karena bisa dilihat dari data wajib pajak yang terhutang masih banyak. Untuk item penilaian ketepatan waktu masyarakat membayar pajak yang menjawab efektif ada 3 responden atau 33% dan yang menjawab cukup efektif ada 6 responden atau 67% yang menjawab tidak efektif 0 responden atau 0%, tetapi berdasarkan pengamatan peneliti untuk item penilaian Ketepatan Waktu Masyarakat Membayar Pajak adalah belum efektif karena berdasarkan observasi peneliti dilapangan wawancara dengan beberapa wajib pajak bahkan ada yang sudah bertahun tahun tinggal di Desa Batang Kulim tetapi hanya sekali atau dua kali membayar Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan Pajak bumi dan Bangunan sendiri adalah iuran wajib setiap tahunnya.

Maka dapat disimpulkan pengukuran untuk indikator Pencapaian Tujuan adalah responden yang menjawab efektif dengan rata-rata 4 atau 44% yang menjawab cukup efektif rata-rata 4 atau 44% dan yang menjawab tidak efektif dengan rata-rata 1 atau 12%. Informasi selanjutnya didapatkan dari Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding melalui teknik wawancara mengenai indikator pencapaian tujuan, adalah sebagai berikut:

“pencapaian tujuan dalam sektor pemungutan pajak bumi dan bangunan bukan tidak mungkin dapat tercapai tetapi memang membutuhkan waktu untuk

mengupayakannya dan melibatkan seluruh sektor yang terlibat baik itu dari dinas yang merupakan petugas yang bertanggung jawab terhadap tugas dan juga peran kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang saat ini masih sangat rendah kesadarannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan (wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding 26 Maret 2020)

Walaupun hasil kuisioner dinas terhadap indikator pencapaian tujuan menunjukkan cukup efektif tetapi berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan belum efektif terhadap indikator ini, hal itu juga di bantu oleh pengamatan peneliti terhadap data target pajak yang peneliti punya, dimana masih besar angka selisih dari target dan juga yang terealisasi.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden masyarakat yang berjumlah 30 orang terhadap indikator pencapaian tujuan dengan metode pengumpulan data kuisioner akan di jelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.6. Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pencapaian Tujuan (Wajib Pajak)

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Tercapainya target pajak	8 27%	16 53%	6 20%	30
2	Ketaatan masyarakat membayar pajak	2 6%	21 70%	7 24%	30
3	Ketepatan waktu masyarakat	0	22	8	30

	membayar pajak	0%	73%	27%	
	Jumlah	10	59	21	90
	Rata-rata	4	19	7	30
	Presentase (%)	13%	63%	24%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator pencapaian tujuan pada item tercapainya target pajak responden menjawab efektif sebanyak 8 responden atau 27%, cukup efektif sebanyak 16 responden atau 53%, dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 6 responden atau 20%. Sedangkan untuk item penilaian kedua yaitu ketaatan masyarakat membayar pajak yang menjawab efektif sebanyak 2 responden atau 6%, yang menjawab cukup efektif sebanyak 21 responden atau 70% dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 7 responden atau 24%. Untuk item penilaian ketiga yaitu ketepatan waktu masyarakat membayar pajak responden yang menjawab efektif sebanyak 0 responden atau 0% yang menjawab cukup efektif 22 responden atau 73% dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 8 responden atau 27%. Maka dapat disimpulkan responden yang menjawab efektif dengan rata-rata 4 responden atau 13%, yang menjawab cukup efektif dengan rata-rata 19 responden atau 63%, dan yang menjawab tidak efektif dengan rata-rata 7 orang atau 24%.

Maka hasil untuk indikator pencapaian tujuan dari masyarakat dominan adalah Cukup Efektif.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, menurut peneliti pencapaian tujuan dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

belum efektif sesuai dengan data yang peneliti peroleh dan analisa karena berdasarkan data 3 tahun terakhir yang didapat target pajak sangat tidak sesuai dengan yang terealisasi.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi. Setelah melakukan penyebaran kuisioner kepada responden dan pengelola data maka untuk indikator Integrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel V.7. Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Integrasi (Dinas)

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Sosialisasi tentang sadar pajak	3 33%	6 67%	0 0%	9
2	Pendataan pembayaran kepada wajib pajak	4 44%	4 44%	1 12%	9
3	Pemberitahuan kepada wajib pajak	3 33%	6 67%	0 0%	9
Jumlah		10	16	1	27
Rata-rata		3	5	1	9
Presentase (%)		33%	56%	11%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada item penilaian sosialisasi sadar pajak responden yang menjawab Efektif sebanyak 3 responden atau 33% dan yang menjawab cukup efektif sebanyak 6 responden atau 67% dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 0 responden atau 0%, tetapi berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada staff pegawai bahwa tidak adanya jadwal pasti berbentuk dokumen sah mengenai sosialisasi sadar pajak, dari sisi itu saja bisa dilihat bahwa sosialisasi sadar pajak ini belum efektif karena dokumen sah sebagai panduan kerjanya tidak ada. Kemudian pada item penilaian yang kedua yaitu pendataan kepada wajib pajak yang menjawab efektif sebanyak 4 responden atau 44% yang menjawab cukup efektif sebanyak 4 responden atau 44% atau yang menjawab tidak efektif sebanyak 1 responden atau 11%, tetapi menurut peneliti untuk item penilaian pendataan kepada wajib pajak adalah cukup efektif, dimana pendataan ini memanglah ada dilakukan tetapi berdasarkan wawancara peneliti kepada staff pegawai bagian data dan juga wawancara kepada kepala bidang bagian Pajak Bumi dan Bangunan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masalah terhadap Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kesalahan data yang mereka miliki dan juga data yang tidak upgrade, hal itu bisa peneliti benarka karena berdasarkan observasi peneliti dilapangan menemukan adanya pemberian SPT yang double untuk satu nama wajib pajak dan untuk bangunan yang sama, kemudian temuan yang peneliti dapatkan juga SPT yang keluar atas nama pemilik objek pajak sebelumnya padahal sudah berganti pemilik. Kemudian pada item penilaian ketiga yaitu pemberitahuan kepada wajib pajak yang menjawab efektif sebanyak 3 responden atau 33% yang menjawab cukup efektif sebanyak 6 responden atau

67% kemudian yang menjawab tidak efektif sebanyak 1 responden atau 0 atau 0%. Maka rata-rata responden yang menjawab efektif adalah 3 responden atau 33% dan rata-rata yang menjawab cukup efektif sebanyak 5 responden atau 56% dan rata-rata yang menjawab tidak efektif sebanyak 1 responden atau 11%, tetapi menurut peneliti untuk item penilaian pemberitahuan kepada wajib pajak adalah belum efektif karena berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan banyak wajib pajak yang tidak mendapatkan SPT selama bertahun-bertahun, dan juga peneliti menemukan fakta adanya SPT yang tertumpuk di kantor desa jadi peneliti menganalisa bisa saja item penilaian pemberitahuan kepada wajib pajak dijawab cukup efektif oleh staff pegawai karena merasa sudah mendistribusikan SPT kepada desa selaku perpanjangan tangan dari dinas, tetapi tetap saja seharusnya diawasi oleh dinas karena itu adalah tanggung jawab dinas, dan pada kenyataannya SPT tidak sampai kepada Wajib Pajak. Informasi selanjutnya didapatkan dari Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding melalui teknik wawancara mengenai indikator pencapaian tujuan, adalah sebagai berikut:

“pencapaian tujuan dalam sektor pemungutan pajak bumi dan bangunan bukan tidak mungkin dapat tercapai tetapi memang membutuhkan waktu untuk mengupayakannya dan melibatkan seluruh sektor yang terlibat baik itu dari dinas yang merupakan petugas yang bertanggung jawab terhadap tugas dan juga peran kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang saat ini masih sangat rendah kesadarannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan (wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding 26 Maret 2020)

Maka pada indikator Integrasi jawaban responden yang dominan adalah Cukup Efektif.

Walaupun jawaban dinas terhadap indikator integrasi adalah cukup efektif, tetapi berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan adalah belum efektif untuk indikator integrasi. Seperti item penilaian untuk sosialisasi sadar pajak, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada dinas tidak ada jadwal pasti kapan sosialisasi sadar pajak dilakukan, data absensi sosialisasi sadar pajak pun hanya data fiktif. Kemudian peneliti melakukan observasi kepada masyarakat wajib pajak guna sebagai bahan perbandingan atas jawaban dinas, banyak jawaban adalah tidak pernah merasa mendapatkan sosialisasi sadar pajak dalam bentuk undangan ke suatu tempat atau acara tertentu, walaupun ada yang menjawab pernah itu sudah bertahun-tahun yang lalu.

Selanjutnya untuk menegetahui jawaban responden masyarakat sebanyak 30 orang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.8. Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Integrasi (Wajib Pajak)

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Sosialisasi tentang sadar pajak	1 3%	22 74%	7 23%	30
2	Pendataan pembayaran kepada wajib pajak	11 37%	11 37%	8 26%	30
3	Pemberitahuan kepada wajib pajak	3 10%	13 43%	14 47%	30
Jumlah		15	46	29	90
Rata-rata		5	15	10	30
Presentase (%)		17%	50%	33%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada item penilaian sosialisasi sadar pajak responden yang menjawab Efektif sebanyak 1 responden atau 3% dan yang menjawab cukup efektif sebanyak 22 responden atau 74% dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 7 responden atau 23%. Kemudian pada item penilaian yang kedua yaitu pendataan kepada wajib pajak yang menjawab efektif sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab cukup efektif sebanyak 11 responden atau 37% atau yang menjawab tdak efektif sebanyak 8 responden atau 26%. Kemudian pada item penilaian ketiga yaitu pemberitahuan kepada wajib pajak yang menjawab efektif sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab cukup efektif sebanyak 13 responden atau 43% kemudian yang menjawab tidak efektif sebanyak 14 responden atau 0 atau 47%. Maka rata-rata responden yang menjawab efektif adalah 5 responden atau 17% dan rata-rata yang menjawab cukup efektif sebanyak 15 responden atau 50% dan rata-rata yang menjawab tidak efektif sebanyak 10 responden atau 33%.

Maka pada indikator Integrasi jawaban responden yang dominan adalah Cukup Efektif.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, menurut peneliti indikator integrasi belum efektif karena petugas melaksanakan tugas nya belum optimal dan tidak stabil, sosialisasi, pendataan, dan pemeberitahuan kepada wajib pajak di laksanakan terkesan tidak serius karena tidak stabil waktu pelaksanaannya, dan tidak merata pelaksanaanya. Banyak masyarakat yang tidak menerima surat pemberitahuan tagihan pajak atau banyak juga masyarakat yang menerima tetapi salah identitas atau salah nama hak milik bangunan.

3. Adaptasi

Adaptasi sebagaimana kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan dalam hal kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan seperti dalam proses pembuatan kebijakan yang sesuai untuk mengatur, menjalin kerja sama dan juga hal lainnya adaptasi untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Setelah kuisioner di sebarakan kepada responden masyarakat kemudian data diolah maka untuk indikator Adaptasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.9. Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Adaptasi (Dinas)

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Komunikasi dengan perangkat terkait	2 22%	7 78%	0 0%	9
2	Ketersediaan pembayaran alternatif	3 33%	6 67%	0 0%	9
3	Pemberian sanksi dari petugas	3 33%	0 0%	6 67%	9
Jumlah		8	13	6	27
Rata-rata		3	4	2	9
Presentasi (%)		33%	45%	22%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada item penilaian komunikasi dengan perangkat lain terkait yang menjawab efektif sebanyak 2 responden atau 22% yang menjawab cukup efektif sebanyak 7 responden atau 78% dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 0 responden atau 0%, walaupun item penilaian komunikasi dengan perangkat lain terkait menunjukkan cukup efektif tetapi menurut peneliti ada beberapa hal yang perlu dibenahi, bisa dilihat dari penemuan adanya SPT yang tertumpuk di kantor desa itu bisa saja disebabkan karenan koordinasi perintah yang tidak jelas dan pasti hingga membuat pihak pemerintahan desa tidak pasti SPT itu harus diapakan . Kemudian item penilaian kedua ketersediaan pembayaran alternatif yang menjawab efektif sebanyak 3 responden atau 33% yang menjawab cukup efektif sebanyak 6 responden atau 67% yang menjawab tidak efektif sebanyak 6 responden atau 67%, tetapi berdasarkan observasi peneliti terhadap wajib pajak ketersediaan alternatif yang disediakan seperti membayar pajak bumi dan bangunan sama sekali tidak memotivasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan malah masyarakat semakin biasa saja karena tidak lebih sungkan daripada dipungut petugas langsung dan juga tidak adanya sanksi, ada juga yang membuat ketersediaan alternatif pembayaran ini belum efektif karena keterbatasan wawasan masyarakat pedesaan dengan teknologi dan juga memang dari diri wajib pajak itu sendiri terlihat sangat tidak berminat mengurus hal semacam itu. Kemudian item penilaian ketiga pemberian sanksi dari petugas yang menjawab efektif sebanyak 3 responden atau 33% yang menjawab cukup efektif sebanyak 0 responden atau 0% dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 6 responden atau 67%. Maka rata-rata

responden yang menjawab efektif sebanyak 3 responden atau 33%, rata-rata yang menjawab cukup efektif sebanyak 4 responden atau 45%, dan rata-rata yang menjawab tidak efektif sebanyak 2 responden atau 22%. Informasi selanjutnya diperoleh dari Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding adalah sebagai berikut:

“dinas sudah melakukan penyesuaian terhadap masyarakat seperti pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan dan ada juga penyesuaian dalam bentuk motivasi seperti keterkaitan dalam hal administrasi semisal untuk mengurus surat nikah harus menyertakan surat tagihan pajak bumi dan bangunan 2 tahun terakhir, itu semua adalah bentuk kebijakan penyesuaian terhadap masyarakat. Kemudian pengadaan pegawai yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak bumi dan bangunan serta jalinan kerjasama dengan pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan dari dinas” (Wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding 26 maret 2020)

Maka kuisisioner adaptasi jawaban dari responden pegawai dominan kepada Cukup Efektif.

Walaupun dari dinas hasil terhadap indikator adaptasi adalah cukup efektif, tetapi menurut peneliti berdasarkan olahan data wawancara dan observasi lapangan indikator adaptasi belum efektif semisal atas item penilaian komunikasi antara dinas dengan pemerintah desa belum efektif hal itu bisa dilihat dari fenomena yang sudah peneliti paparkan banyak SPT yang menumpuk di kantor desa, ini

artinya koordinasi perintah atau motivasi seperti apa yang dinas turunkan kepada desa belum tepat sehingga tidak jelas kenapa pemerintah desa tidak kepada SPT tidak disebarakan hingga menumpuk. Dilihat dari item penilaian alternatif pembayaran juga menurut peneliti belum efektif memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak, karena di Desa Batang Kulim banyak yang kemampuan teknologinya masih sangat kurang, dan fasilitas bank jauh dari desa membuat masyarakat tetap tidak termotivasi atas ketersediaan alternatif pembayaran yang ada. Terlebih tidak adanya sanksi yang diberikan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden masyarakat yang berjumlah 30 responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.10. Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Adaptasi (Wajib Pajak)

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Komunikasi dengan perangkat lain terkait	5 16%	18 60%	7 24%	30
2	Ketersediaan pembayaran alternatif	13 43%	8 27%	9 30%	30
3	Pemberian sanksi dari petugas	0 0%	13 43%	17 57%	30
Jumlah		18	39	33	90
Rata-rata		6	13	11	30
Presentase (%)		20%	44%	36%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada item penilaian komunikasi dengan perangkat lain terkait yang menjawab efektif sebanyak 5 responden atau 16% yang menjawab cukup efektif sebanyak 18 responden atau 60% dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 7 responden atau 24%. Kemudian item penilaian kedua ketersediaan pembayaran alternatif yang menjawab efektif sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab cukup efektif sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab tidak efektif sebanyak 9 responden atau 30%. Kemudian item penilaian ketiga pemberian sanksi dari petugas yang menjawab efektif sebanyak 0 responden atau 0%, yang menjawab cukup efektif sebanyak 13 responden atau 43%, yang menjawab tidak efektif sebanyak 17 responden atau 57%. Maka rata-rata responden yang menjawab efektif sebanyak 6 responden atau 20%, rata-rata yang menjawab cukup efektif sebanyak 13 responden atau 44%, dan rata-rata yang menjawab tidak efektif sebanyak 11 responden atau 36%.

Jadi kuisisioner untuk indikator adaptasi dari responden masyarakat dominan kepada Cukup Efektif.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan indikator adaptasi dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum efektif. Karena ada masyarakat yang mendapat pemberitahuan dari desa selaku perpanjangan tangan dari BPKAD tetapi ada juga masyarakat yang sama sekali tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Juga ketersediaan alternatif pembayaran belum semua masyarakat paham dengan alternatif yang disediakan dan juga alternatif yang disediakan berupa sistem

elektronik membuat masyarakat merasa berkurang rasa takut dan sungkannya daripada ketika petugas memungut secara langsung.

Setelah melakukan pembahasan masing-masing indikator maka untuk melihat hasil penelitian secara keseluruhan perlu dilakukan rekapitulasi seluruh tanggapan responden penelitian mengenai Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan meliputi 3 indikator penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.11. Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (Dinas)

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Pencapaian Tujuan	4 44%	4 44%	1 12%	9
2	Integrasi	3 33%	5 56%	1 11%	9
3	Adaptasi	3 33%	4 45%	2 22%	9
Jumlah		10	13	4	27
Rata-rata		3	4	2	9
Presentase (%)		33%	45%	22%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas setelah dilakukan pengolahan data rekapitulasi dari seluruh jawaban responden pegawai yaitu 9 responden mengenai 3 indikator yang mana setiap indikator terdiri dari 3 item penilaian maka hasil akhir rata-rata yang menjawab efektif terdapat 3 responden atau 33% dan yang menjawab cukup efektif dengan rata-rata 4 responden atau 45% dan yang menjawab tidak efektif dengan rata-rata 2 responden atau 22%. Maka hasil Rekapitulasi jawaban dari responden pegawai berada pada kategori Cukup Efektif

Selanjutnya rekapitulasi dari 30 responden masyarakat, berikut tabel dibawah ini.

Tabel V.12. Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (Wajib Pajak)

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Pencapaian Tujuan	4 13%	19 63%	7 24%	30
2	Integrasi	5 17%	15 50%	10 33%	30
3	Adaptasi	6 20%	13 44%	11 36%	30
	Jumlah	15	47	28	90
	Rata-rata	5	16	9	30
	Presentase	17%	53%	30%	100%

Sumber:Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas maka hasil akhir jawaban dari responden masyarakat yang menjawab efektif dengan rata-rata 5 responden atau 17% yang menjawab cukup efektif dengan rata-rata 16 responden atau 53% dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 9 responden atau 30%. Maka hasil akhir jawaban responden masyarakat berada pada kategori Cukup Efektif

Jawaban dari seluruh Responden pegawai dan masyarakat kesimpulannya memiliki hasil yang berada pada kategori “Cukup Efektif”.

Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim saat ini belum efektif karena saat melakukan riset banyak sekali masyarakat yang sangat ringan mengatakan bahwa mereka tidak membayar pajak bumi dan bangunan dari waktu terdahulu, walaupun ada membayar itu hanya beberapa kali dalam rentang waktu yang lama mereka sudah domisili di Desa Batang Kulim, ketika ditanya kenapa bisa seperti itu, sebagian responden masyarakat menjawab tidak ada nya petugas yang memungut jadi kesadaran dari diri masyarakat pun tidak ada, tetapi saat pernah di pungut sebelumnya barulah mereka membayar. Sangat rendah masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan dapat di buktikan dengan data yang peneliti dapatkan berupa data target pajak bumi dan bangunan desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana data target nya sangat jauh dengan yang terealisasi.

C. Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Hambatan adalah suatu rintangan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kegiatan. Hambatan ini bisa menjadi penyebab yang bisa mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang peneliti rangkumkan perindikator, yakni:

1. Hambatan dari indikator Pencapaian Tujuan adalah kesalahan data yang dimiliki dinas akibat tidak upgrade terhadap pendataan yang seharusnya dilakukan rutin sehingga mengakibatkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim menjadi tidak efektif berdampak kepada target pajak bumi dan bangunan di desa Batang Kulim realisasi nya tidak sesuai dengan target yang di canangkan dan tentu nya hal ini akan berdampak pada pembangunan yang ada di Desa itu sendiri, karena bagaimana pun pajak adalah maha sumber dana untuk melakukan pembangunan
2. Hambatan dari indikator Integrasi adalah program dinas yang dijalankan tidak optimal seperti sosialisasi yang tidak merata di Desa Batang Kulim dan juga jadwal program tersebut yang tidak pasti, padahal sosialisasi adalah sangat perlu melihat minim nya pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan bangunan serta kesadaran masyarakat untuk membayarnya. Sosialisasi serta pemberitahuan informasi mengenai pajak bumi dan bangunan baik itu

penagihan menyampaikan SPT adalah tupoksi dinas tetapi dinas belum efektif melaksanakannya

3. Hambatan dari indikator Adaptasi adalah komunikasi pihak dinas yang kurang efektif dengan pemerintahan desa mengingat sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari dinas untuk bisa membantu menginfokan kepada masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta observasi yang telah dilaksanakan peneliti mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 3 indikator: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Maka peneliti mengambil kesimpulan dan saran untuk bahan acuan dari hasil penelitian yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini terutama untuk masukan kepada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB):

1. Untuk indikator Pencapaian Tujuan dengan item penilaian Tercapainya target pajak sesuai dengan ketetapan daerah, Ketaatan masyarakat membayar pajak dan ketepatan waktu masyarakat membayar pajak maka di peroleh jawaban dari responden pegawai dan wajib pajak adalah “Cukup Efektif”
2. Untuk indikator Integrasi dengan item penilaian Sosialisasi tentang pajak, Pendataan pembayaran kepada wajib pajak, dan pemberitahuan kepada wajib pajak maka di peroleh jawaban dari responden pegawai dan wajib pajak adalah “Cukup Efektif”
3. Untuk indikator Adaptasi dengan item penilaian Komunikasi dengan perangkat lain, ketersediaan pembayaran alternatif, pemberian sanksi dari petugas, maka jawaban dari responden pegawai dan wajib pajak adalah “Cukup Efektif”

Dari keseluruhan kesimpulan indikator dapat dilihat jawaban dari responden pegawai dan jawaban responden wajib pajak semuanya sama yaitu cukup efektif, dengan demikian sudah dipastikan terdapat beberapa kekurangan keselarasan kerjasama antara pegawai dinas dan juga masyarakat sehingga Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak berada pada kategori Efektif yang mana dinas memiliki banyak kesalahan data yang tidak di upgrade dan masyarakat pun memiliki kesadaran diri yang rendah untuk membayar ataupun melaporkan bangunan huniannya yang tidak terdaftar. Dinas mungkin melakukan pendataan tetapi tidak optimal, dan tidak bersungguh-sungguh ketika melakukannya.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti paparkan adalah sebagai berikut:

1. Melihat dari persoalan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang sudah berlarut-larut lamanya, dinas harus serius mencari tau dimana letak kesalahan dan solusi untuk mengatasinya. Karena biar bagaimanapun pajak adalah sumber pemasukan Negara yang besar dan digunakan untuk pembangunan. Sementara target pajak tidak sesuai dengan realisasi yang dicapai
2. Segala tupoksi yang melekat pada dinas terkhusus pegawai yang bertanggung jawab penuh atas pemungutan pajak bumi dan bangunan mengevaluasi kembali kinerjanya agar optimal, yang berpengetahuan lebih adalah petugas sementara masyarakat dengan kemampuan pengetahuan yang beragam tentunya memiliki keterbatasan dalam memahami. Oleh karena itu petugas harus serius dalam menjalankan tugasnya, salah satunya melakukan pemungutan dan juga serius melaksanakan program-program yang dapat menaikkan

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

3. Kesalahan pendataan serta data yang tidak upgrade adalah pemicu utama yang menyulitkan petugas untuk memungut pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu petugas harus melakukan pendataan yang akurat lagi serta rutin, karena setiap waktu nya ada saja masyarakat yang melakukan pembangunan dan tentu nya mereka tidak melaporkan kepada dinas karena merasa tidak adanya sanksi, padahal jelas diatur di dalam Undang-undang perihal pajak Bumi dan Bangunan yang mana kalau sudah tercantum dalam Undang-undang berarti itu harus. Dan petugas harus memahami masalah itu benar terjadi di lapangan sehingga petugas lah yang akan turun mendata.
4. Sebaiknya dinas memanfaatkan pemerintah desa selaku perpanjangan tangan dari dinas dengan optimal, bangun komunikasi yang baik untuk mejelaskan pekerjaan-pekerjaan apa saja terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dapat di rangkul bersama-sama. Seperti pendataan, pembagian SPT, dan juga sosialisasi sadar pajak yang bisa diwakilkan penyampaiannya oleh pemerintah desa. Tetapi walaupun begitu tetap dinas harus mengawasi pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif atau belum, karena petanggung jawaban penuh mengenai Efektifitas Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim adalah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Penagiahn PBB dan BPHTB) kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2016. *Analisi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT Bumi Aksara
- Andry, Hendry dan A. Tarmizi Yussa, 2015, *Prilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Agustino Leo, 2016. *Dasar-dasar kebijakan public*, Bandung: Alfabeta
- Ardana I Komang, dkk, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Greha Ilmu
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI-Pres: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Edy Sutrisno, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Hamalik, Oemar, 2001, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenaga Kerjaanpen dekatan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hadari, Nawawi, 2016. *Kepemimpinan mengefektifkan organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University
- Heena Aime, 2010, *Manajemen Strategis Keorganisasian Publik*, Bandung: PT Refika Aditama
- Indiahono Dwiyanto, 2009, *Perbandingan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administasi Jakrta* : Salemba Humanika
- Malayu, Hasibuan, 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Syafiie, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 2003, *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Siswanto, 2015, *pengantar manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara

- Soemitro, Rochmat. 1986. Pajak Bumi dan Bangunan. PT Eresco: Bandung
- Suparmoko. 2000. Keuangan Negara: Dalam teori dan praktek. PT BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Sagian P. Sondang, 2014. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Wedayanti, Made Devi. 2018. *Manajemen Corporate Social Responsibility*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Website : bpkad.pelalawankab.go.id
- Richard M. Steers 2008 *Efektivitas Org* 76 karta
- Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Dokumen :
- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa, 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
- Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pelalawan
- Suryani, Evi. 2016. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- UU pasal 18 ayat 2 tahun 2002 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 77 Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan